

INDIA DAN ASIA TENGGARA

Michael B. SOEBAGYO*

PENDAHULUAN

Keadaan politik di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara menunjukkan suhu yang tinggi, khususnya karena Indocina dan Afghanistan menjadi area pertarungan kekuatan politik. Pertarungan ini memberikan peluang kepada negara-negara superpower untuk melibatkan diri dan berebut pengaruh politik. Intervensi Uni Soviet di Afghanistan dan campur tangan Vietnam di Kampuchea yang diduga bersumber pada ekspansionisme Uni Soviet dan Vietnam mengundang kekuatan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang telah berkecenderungan untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet dengan cara apa pun.

Intervensi Uni Soviet di Afghanistan itu telah menciptakan "Perang Dingin" di ambang pintu India. Sebagai reaksi terhadap kejadian ini maka terjadi peningkatan kegiatan di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Diego Garcia, sebuah pulau atol yang terletak 1.000 mil di sebelah selatan India. Selain itu Pakistan menjadi negara penyangga baru terhadap perluasan pengaruh Uni Soviet. Untuk menghadapi ancaman baru Uni Soviet itu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan Pakistan. Dalam rangka itu Amerika Serikat dan Cina memberikan bantuan militer termasuk persenjataan yang mutakhir.

Dalam masalah Kampuchea belum ada titik terang penyelesaian secara damai. Gerilyawan-gerilyawan Khmer Merah dan kelompok-kelompok perlawanan lain berusaha menumbangkan rezim Heng Samrin yang didukung kekeuatan militer Vietnam. Sejauh ini Pemerintah Kampuchea Demokratis mendapat dukungan internasional yang luas karena dianggap pemerintah yang

*Staf CSIS.

sah. Bentrokan bersenjata telah terjadi di perbatasan Muangthai dan Cina. Bahkan telah terjadi "perang lokal" yang melibatkan kekuatan militer Cina dan Vietnam. Vietnam mendapat dukungan dari Uni Soviet karena kedua negara ini telah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama.

Sehubungan dengan perkembangan di anak benua India dan sekelilingnya itu, Menlu India P. V. Narasimha Rao mengatakan di depan Parlemen India bahwa keadaan dunia dewasa ini menunjukkan suhu yang eksplosif, dan bahwa dasawarsa 1970-an merupakan masa peredaan ketegangan atau "detente" sedangkan dasawarsa 1980-an suatu periode konfrontasi. Pernyataan ini khususnya dikeluarkan sehubungan dengan timbulnya "Perang Dingin" di Asia Selatan dan "Perang Lokal" di kawasan Asia Tenggara. Ketakutan akan ancaman terhadap keamanan nasionalnya membuat India melihat kawasan Asia Selatan sebagai medan konfrontasi kekuatan superpower.

Diplomasi yang dilancarkan India dalam masalah Afghanistan dan Indocina tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Pada umumnya diplomasi India itu tidak mendukung tetapi malahan bertentangan dengan keputusan yang diambil ASEAN. India bukan saja tidak mendukung ASEAN dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai masalah Kampuchea tetapi juga mengakui rezim Heng Samrin dan memboikot Konferensi Internasional tentang Kampuchea yang diadakan di bawah naungan PBB. India tidak membantu usaha ASEAN untuk menyelesaikan masalah Kampuchea secara damai. Sebagai akibatnya hubungan India-ASEAN menjadi lebih renggang.

Sebaliknya dapat dilihat jelas bahwa India mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Uni Soviet. Kedua negara ini telah menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama pada tahun 1971. Uni Soviet banyak membantu India dalam pembangunan militer, industri dan juga teknologi. Dukungan Uni Soviet juga memperkuat kedudukan India untuk berunding dengan Cina untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tahun 1962. Sejak lama India juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Vietnam, antara lain karena sejak era Ho Chi Minh sampai Pham van Dong Vietnam selalu mendukung India dalam sengketanya dengan Pakistan mengenai Kashmir. Dan hubungan ini menjadi lebih erat karena mereka merasakan Cina sebagai ancaman bersama. Selain itu Vietnam juga mempunyai Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama dengan Uni Soviet.

Mengingat potensi India sebagai negara yang besar dan negara terkemuka dalam gerakan Non-Blok, maka ASEAN dapat merintis kerja sama dengan negara itu dalam dialog dengan negara-negara yang sudah maju. Di samping itu ASEAN merupakan pasar barang yang sementara ini dikuasai oleh Jepang

dan oleh sebab itu sangat bergantung padanya. Masuknya barang-barang industri India bisa mengurangi ketergantungan itu.¹ Se jauh ini India dan ASEAN berbeda persepsi mengenai ancaman Cina terhadap negara-negara Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan sejauh mana dapat dicapai titik temu antara mereka.

INDIA DAN MASALAH KAMPUCHEA

Konflik di Indocina telah menimbulkan perang lokal. Vietnam menyerbu Kampuchea untuk menggulingkan Pemerintah Khmer Merah pimpinan Pol Pot dan kemudian menunjuk pemerintah baru di bawah Heng Samrin. Sementara itu Cina ingin mempunyai pengaruh yang kuat atas negara-negara tetangganya karena tidak menginginkan bahwa keamanan nasionalnya terancam oleh kepungan musuh. Se jauh ini Cina terlibat dalam sengketa perbatasan dengan Vietnam dan tidak menginginkan bahwa kepemimpinan negara-negara Indocina berada di tangan Vietnam yang bersahabat dengan Uni Soviet, musuh nomor satunya. Sebagai reaksi terhadap campur tangan Vietnam di Kampuchea itu, rezim Pol Pot yang telah digulingkan melancarkan perang gerilya dan terjadi pertempuran-pertempuran sengit di daerah perbatasan Kampuchea-Muangthai. Dengan demikian perang lokal itu mau tidak mau melibatkan Muangthai sebagai negara tetangga yang paling dekat. Dengan negara-negara ASEAN lainnya Muangthai tidak mengakui rezim Heng Samrin sebagai Pemerintah Kampuchea yang sah karena dipaksakan oleh tentara Vietnam. Bagi mereka rezim Kampuchea Demokratis (Khmer Merah) merupakan Pemerintah Kampuchea yang sebenarnya.

Perkembangan polarisasi kekuatan dalam krisis Kampuchea ini semakin mempersulit upaya untuk menyelesaikannya secara damai. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa sejak Vietnam menempatkan pasukannya di Kampuchea pada akhir tahun 1978 sering terjadi bentrokan bersenjata dan pelanggaran perbatasan Muangthai. Untuk memaksa Vietnam menarik mundur pasukannya dari Kampuchea, Cina melakukan serangan hukuman terhadapnya dalam "Perang Perbatasan Cina-Vietnam" dalam bulan Pebruari-Maret 1979. Kedua negara menderita kerugian besar karena kehilangan banyak pasukan dan peralatan militer, akan tetapi maksud Cina tidak tercapai. Di bawah tekanan internasional yang terus meningkat, Cina akhirnya menarik mundur pasukannya akan tetapi mengancam akan melancarkan serangan hukuman lagi bila Vietnam melakukan provokasi-provokasi baru.

Sementara itu rezim Heng Samrin mendapatkan pengakuan sebagai pemerintah sah Kampuchea dari beberapa negara, antara lain Uni Soviet. Pada

¹Lihat karangan dalam *Asiaweek*, 12 Juni 1981.

7 Juli 1980 Pemerintah India juga mengakuinya dan membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Kampuchea di bawah pimpinannya. Dalam suatu pernyataan politik di depan Parlemen India Menlu P.V. Narasimha Rao atas nama Pemerintah India mengatakan: (1) India telah mempunyai hubungan yang erat dengan Kampuchea sejak berabad-abad; (2) perkembangan di Asia Tenggara menghendaki peredaan ketegangan dan peningkatan stabilitas regional agar dapat dibangun masyarakat yang makmur; (3) hubungan India-ASEAN akan terus ditingkatkan sebab dialog yang intensif akan membantu menyelesaikan persoalan; dan (4) pengakuan terhadap pemerintah baru Kampuchea dilakukan berdasarkan keinginan mayoritas opini politik di India dan Kampuchea membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional untuk membangun perekonomian, memulihkan infrastruktur dan status kedaulatan negara serta bangsa yang merdeka dan netral.¹

Usaha India untuk ikut menyelesaikan masalah Kampuchea itu dilakukan dengan membentuk dan mengirimkan suatu Misi Pencari Fakta ASEAN-Vietnam pimpinan Dinesh Sing. Misi ini berusaha memberikan pengertian bahwa India mengikuti cara legal untuk mengakui suatu pemerintah. Faktor utama yang diperhatikan ialah bahwa pemerintah itu berfungsi secara efektif. Soal setuju atau tidak setuju dengan pemerintah itu tidak masuk perhitungan.² Di lain pihak, keterlibatan Vietnam di Kampuchea dengan menempatkan pasukannya mempunyai tujuan yang serupa tujuan keterlibatan India dalam Perang Bangladesh tahun 1971. Hal ini menunjukkan bahwa India telah memihak Vietnam dengan mengatakan bahwa intervensi Vietnam di Kampuchea menyerupai campur tangan India di Pakistan Timur dalam Perang Bangladesh.³

Juga dikatakan bahwa pengakuan itu dilakukan oleh Pemerintah PM Indira Gandhi yang baru saja tampil kembali sebagai pemimpin India. Keberhasilan Indira Gandhi itu sebagian adalah berkat janji yang tercantum dalam manifesto kampanye pemilihan umum untuk mengakui pemerintah baru Kampuchea. Dengan demikian tampilnya kembali Indira Gandhi sebagai Perdana Menteri India mempercepat proses pengakuan Pemerintah Heng Samrin. Alasan yang dapat diutarakan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Indira Gandhi telah terikat komitmen manifesto yang diumumkan dalam kampanye Pemilu 1980, sehingga setelah dipilih melakukan pengakuan itu; (2) keputusan itu berarti telah diambil berdasarkan kemauan politik mayoritas rakyat India karena Partai Kongres (I) memenangkan 67% kursi Lokh Sabha (Majelis Rendah); dan (3) faktor utama pengakuan suatu pemerintah yang baru ialah bahwa ia berfungsi secara efektif.

¹*India News* (Information Service of India, Embassy of India), 8 Juli 1980.

²*Antara*, 17 Mei 1980.

³*Pelita*, 5 Maret 1980.

PEMERINTAHAN KEDUA PM INDIRA GANDHI

Dalam pemerintahannya yang pertama Indira Gandhi memimpin India selama 10 tahun. Partai Kongres yang sejak India merdeka menguasai kehidupan politiknya memenangkan Pemilu 1967 dan memilih Indira Gandhi sebagai pengganti PM Lal Bahadur Shastri yang meninggal di Tashkent pada tahun 1966. Dalam Pemilu 1970/1971 Partai Kongres menang lagi dalam koalisi dengan Partai Komunis Kerala. Bulan Juni 1975 PM Indira Gandhi mengumumkan hukum darurat militer karena merasa bahwa pemerintah dirongrong aksi-aksi yang dilancarkan kelompok oposisi. Sebagai akibat eksekusi-eksekusi yang terjadi dalam keadaan darurat itu Indira Gandhi mengalami kekalahan dalam Pemilu Maret 1977 dan pemerintahan diambil alih oleh Partai Janata.

Akan tetapi hampir selama 3 tahun di bawah pemerintahan koalisi Janata, India mengalami masa yang paling suram. Akibat perebutan kekuasaan antara para pemimpin Partai Koalisi pemerintah tidak dapat bekerja dengan baik. Akhirnya dalam Pemilu 1980 Indira Gandhi memperoleh kepercayaan rakyat lagi untuk memimpin India. Dalam pemerintahannya yang baru Indira Gandhi merangkap sebagai menteri pertahanan, sedangkan pembantu-pembantunya adalah wajah-wajah baru yang masih muda. Yang menarik perhatian ialah bahwa Pemerintah Indira Gandhi ini mendapat dukungan kuat dari badan legislatif. Dalam Lok Sabha, Partai Kongres (I) menduduki sebanyak 355 dari 542 kursi. Sebaliknya dalam Rajya Sabha (Majelis Tinggi), Partai Kongres (I) hanya menguasai 69 dari 244 kursi. Hal ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya hanya menghadapi oposisi yang berarti dalam Majelis Tinggi dan tidak mengalami kesulitan dalam Majelis Rendah.

Pada awal pemerintahannya, Indira Gandhi melakukan suatu tindakan yang tegas dan pragmatis dalam politik luar negeri, yaitu mengakui pemerintah Heng Samrin. Tindakan ini mengukuhkan posisi Vietnam dan Uni Soviet. Sehubungan dengan itu perlu dipertanyakan apakah sikap India netral atau mendua. Di satu pihak India cenderung untuk mempertahankan sikap Non-Blok, tetapi di lain pihak cenderung untuk mendukung Uni Soviet.¹ Akan tetapi sampai batas-batas tertentu tindakan tersebut menunjukkan sikap yang waspada. Menurut Chanaknya, seorang ahli filsafat purba dan pendukung ajaran Machiavelli, pengakuan Pemerintah Heng Samrin itu dimaksud untuk menjadikan negara tetangga seorang sahabat guna menghadapi tetangga besar yang mereka musuhi bersama.² Hal itu semata-mata dilakukan untuk mengertak Cina yang sangat akrab dengan Pakistan dan meningkatkan bantuannya kepada Islamabad.

¹*Pelita*, 31 Mei 1980.

²*Far Eastern Economic Review*, 18 Juli 1980.

Tabel 1

VOLUME DAN NERACA PERDAGANGAN INDIA TAHUN 1975-1978
(dalam juta rupee)

	Volume Perdagangan			Neraca Perdagangan		
	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1975/1976	1976/1977	1977/1978
1. Malaysia	471	639	545	185	(39)	125
2. Singapura	647	677	1.200	413	501	180
3. Indonesia ^a *	517	606	407	517	606	407
<i>ASEAN</i>	<i>1.635</i>	<i>1.922</i>	<i>2.152</i>	<i>1.115</i>	<i>1.068</i>	<i>712</i>
1. Arab Saudi	3.502	4.084	3.713	(2.300)	(2.554)	(1.243)
2. Iran	7.320	6.544	6.650	(1.866)	(3.612)	(4.318)
3. Kuwait	1.096	1.944	1.808	(156)	398	446
4. Uni Emirat Arab	663*	2.447	2.306	663	897	534
<i>Teluk Persia</i>	<i>12.581</i>	<i>15.019</i>	<i>14.477</i>	<i>(3.659)</i>	<i>(4.871)</i>	<i>(4.581)</i>
1. Mesir	1.190	1.121	857	812	699	577
2. Sudan	401	719	702	329	331	50
3. Nepal	504	510	—	504	510	—
4. Hongkong	441	768	858	441	768	858
<i>Asia Afrika</i>	<i>2.536</i>	<i>3.118</i>	<i>2.417</i>	<i>2.086</i>	<i>2.308</i>	<i>1.485</i>
1. Cekoslowakia	1.052	683	568	8	1	0
2. Jerman Timur	613	779	684	(95)	79	(2)
3. Polandia	1.611	1.548	1.249	157	786	71
4. Uni Soviet	7.125	7.610	10.985	1.209	1.466	2.149
5. Yugoslavia	395	603	898	191	383	370
<i>Negara Sosialis</i>	<i>10.796</i>	<i>11.223</i>	<i>14.384</i>	<i>1.470</i>	<i>2.715</i>	<i>2.588</i>
1. Belgia	1.307	1.721	3.599	(399)	579	445
2. Perancis	2.709	3.176	1.619	(955)	372	1.301
3. Jerman Barat	4.740	5.352	7.987	(2.392)	(760)	(3.107)
4. Italia	1.597	1.764	1.875	(1)	616	135
5. Belanda	1.413	2.597	2.180	229	1.293	560
6. Swedia*	676	357	577	(676)	(357)	(577)
7. Swiss	1.131	1.249	1.209	39	269	(143)
8. Inggris	6.881	8.414	9.869	1.515	1.990	575
<i>Eropa Barat</i>	<i>20.977</i>	<i>29.565</i>	<i>27.398</i>	<i>(9.103)</i>	<i>(5.063)</i>	<i>(1.320)</i>
1. Kanada	2.735	1.788	2.260	(1.821)	(800)	(1.364)
2. Jepang	7.870	8.400	9.320	774	2.460	774
3. Amerika Serikat	17.875	16.222	14.273	(7.523)	(4.888)	(837)
4. Australia	1.497	3.155	1.545	(533)	(1.835)	107
<i>Asia Pasifik</i>	<i>29.977</i>	<i>29.565</i>	<i>27.398</i>	<i>(9.103)</i>	<i>(5.063)</i>	<i>(1.320)</i>

Sumber: Ministry of Commerce Reports for 1977/1978 and 1978/1979 (India).

* Tanda hanya ekspor atau impor saja.

^a Volume perdagangan adalah ekspor ditambah impor.

Hubungan ekonomi antar negara dapat dilihat sebagai suatu petunjuk hubungan politik yang baik. Beberapa hal dapat diungkapkan dari data perdagangan antara India dan negara-negara partner dagang utamanya (lihat Tabel 1). Dari tahun 1975 sampai 1978 bagian volume perdagangannya dengan negara-negara Eropa Barat dan Asia Pasifik mencapai 65% dari seluruh volume perdagangan luar negerinya, dengan Uni Soviet dan Eropa Timur sekitar 15% dan dengan negara-negara Afrika 20% (lihat Tabel 2). Hubungan ekonomi itu menunjukkan suatu perubahan. Hubungan India dengan Uni Soviet meningkat satu setengah kali dalam periode 1975-1978. Dalam hubungannya dengan Eropa Barat dan ASEAN juga terjadi kenaikan.

Tabel 2

VOLUME PERDAGANGAN INDIA: DISTRIBUSI DAN PERKEMBANGANNYA 1975-1978

	Distribusi Volume Perdagangan			Pertumbuhan Perdagangan		
	1975/76	1976/77	1977/78	1975/76	1976/77	1977/78
1. ASEAN	2	2	2	100	118	132
2. Teluk Persia	16	18	16	100	119	115
3. Asia Afrika	3	4	3	100	123	95
<i>Dunia Ketiga</i>	21	24	21	100	120	114
4. Uni Soviet	9	9	12	100	107	154
<i>Dunia Kedua</i>	14	13	16	100	104	133
5. Eropa Barat	26	29	32	100	120	141
6. Asia Pasifik	38	35	31	100	99	91
<i>Dunia Pertama</i>	64	64	65	100	107	112
	100	100	100	100	110	115

Sumber: Diolah dari tabel sebelumnya.

- Catatan: a. Pengelompokan negara berdasarkan tabel sebelumnya;
 b. Distribusi perdagangan menunjukkan persentase dari seluruh perdagangan;
 c. Pertumbuhan perdagangan dilihat dengan tahun dasar 1975/1976 diberi angka indeks 100.

Hubungan India-ASEAN hanya melibatkan Malaysia, Singapura dan Indonesia. Pada umumnya neraca perdagangan menunjukkan surplus bagi India. Meskipun merupakan bagian yang kecil, hubungan ini menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Sampai tahun 1978, India mengeksport barang ke Indonesia tetapi tidak mengimpor barang dari negara ini. Hubungan dagangnya dengan Mesir, Sudan, Nepal dan Hongkong juga menunjukkan surplus. Demikianpun hubungan dagangnya dengan negara-negara sosialis

seperti Uni Soviet, Yugoslavia, Polandia, Jerman Timur dan Cekoslowakia menunjukkan suatu surplus yang berarti. Hal itu berarti bahwa negara-negara tersebut merupakan pasar bagi barang hasil produksi India.

Hubungan dagang India dengan Teluk Parsi, Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan Australia pada umumnya mengalami defisit. Dari negara-negara itu India membutuhkan minyak bumi dan teknologi yang lebih maju. Akan tetapi defisit neraca perdagangan ini semakin menurun. Kenyataan itu juga menunjukkan bahwa India berusaha mengurangi ketergantungannya pada negara-negara tersebut.

Dalam masalah Indocina tampaknya India melakukan beberapa salah langkah sehingga sejauh ini belum terjalin hubungan yang erat dengan ASEAN. India melihat ASEAN sebagai suatu aliansi negara-negara yang didasarkan atas hubungan ekonomi, sosial dan kebudayaan. ASEAN tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan politis dan militer karena sebagai negara-negara Non-Blok tidak mempunyai aliansi politik atau militer. India mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan beberapa negara ASEAN. Akhir-akhir ini perdagangan India dengan ASEAN mencapai 18-20% dari seluruh perdagangan luar negerinya. India juga mempunyai banyak usaha patungan di kawasan ASEAN. Di Malaysia terdapat sekitar 30 perusahaan patungan India yang sedang beroperasi. Begitu juga India sudah menanamkan modal yang cukup besar di Indonesia. India mengharapkan agar hubungannya dengan ASEAN serupa dengan hubungan yang dijalinnya dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Hal ini berarti bahwa hubungan ekonomi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sikap MEE dalam masalah Afghanistan atau Polandia.¹

Pada umumnya India kurang mendukung usaha-usaha ASEAN untuk menyelesaikan masalah Kampuchea secara damai. Diplomasi ASEAN dalam masyarakat internasional antara lain menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 36 tanggal 6 Oktober 1980, yang menyerukan implementasi Resolusi Majelis Umum PBB No. 33 tanggal 22 Nopember 1979 dan diadakannya konferensi internasional tentang masalah Kampuchea di bawah naungan PBB. Dalam pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang diajukan oleh ASEAN, India tidak memberikan suaranya. Pada pertengahan bulan Juni 1981 India memberitahukan kepada PBB tidak akan menghadiri konferensi internasional tentang masalah Kampuchea yang akan diselenggarakan di New York pada 13 Juli 1981. Konferensi ini dimaksud untuk merundingkan penarikan pasukan asing (Vietnam) dari Kampuchea dan diadakannya pemilihan umum di bawah pengawasan PBB untuk memungkinkan rakyat

¹*Asiaweek*, 12 Juni 1981.

Kampuchea memilih pemerintah yang mereka kehendaki. Dari 140 negara yang ikut dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, 71 negara menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka, yaitu 52 negara menyatakan akan ikut berpartisipasi, 3 negara akan datang sebagai pengamat dan 16 negara menyatakan tidak akan hadir, termasuk India.¹

Dengan demikian diplomasi yang dilakukan oleh India dan ASEAN untuk mencari penyelesaian damai bagi masalah Kampuchea tidak menunjukkan titik temu dan malahan menimbulkan jurang perbedaan yang semakin lebar. Hal itu kurang baik bagi hubungan India-ASEAN.

RRC ANCAMAN TERBESAR BAGI INDIA

Hubungan antara India dan RRC belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Perkembangan masalah Afghanistan dan Indocina tersebut di atas telah menghambat usaha normalisasi hubungan yang dilakukan. Kemungkinan hubungan baik antara mereka masih sulit diramalkan.

Pada tahun 1954 timbul masalah perbatasan RRC-India yang berlarut-larut. Pada tahun 1956 Cina memasuki wilayah Himachal Pradesh (India) dan pada tahun 1957 terjadi insiden berdarah di Ladakh. Akhirnya pada tahun 1962 Cina menyerbu India sejauh 80-100 km. Agresi ini berakhir dengan gencatan senjata karena dunia internasional tidak membenarkannya. Pada tahun 1965-1971 hubungan India-Pakistan sangat buruk karena Pakistan dihasut oleh Beijing untuk melawan India, biarpun kenyataannya Pakistan tidak mendapat dukungan konkrit.²

Pemimpin-pemimpin Cina mengumandangkan semboyan kebangkitan kembali kekuatan Cina yang lama dan pengembalian wilayah-wilayah yang hilang untuk membenarkan tindakan politik terhadap negara tetangganya pada ulang tahun 735 meninggalnya Jenghiz Khan. Mereka menyatakan bahwa: (1) Beijing menuntut kembali 4,5 juta km² wilayah yang menjadi milik negara-negara tetangganya (India, Birma, Laos dan Vietnam); (2) perbatasan Cina-India jauh menjorok ke selatan dibandingkan dengan garis tradisional yang ditetapkan dalam dokumen yang disetujui penguasa lama Tibet India; (3) Cina tidak pernah melanggar tapal batas India dan menduduki satu inci pun wilayahnya. *Renmin Ribao*, surat kabar Maois, menyatakan sikap ini untuk menutupi agresi militer Cina pada tahun 1959-1962 yang merebut 36.000 km² daerah Aksai Chin dan 130.000 km² daerah lain yang diklaim oleh India.³

¹Antara, 21 Juni 1981; dan *Suara Karya*, 22 Juni 1981.

²*Merdeka*, 20 Maret 1979.

³*Berita Buana*, 7 Juni 1980.

Menurut Menteri Pertahanan India di New Delhi, Cina masih tetap mencari kesempatan seperti di masa-masa lampau untuk melancarkan serangan mendadak secara besar-besaran terhadap India. Untuk menunjukkan kemungkinan itu, ia menyebutkan hal-hal berikut: (1) kesediaan India untuk menormalisasi hubungan dan mengatasi rintangan-rintangannya disambut Beijing secara tidak memadai dengan janji yang samar-samar dan tak pernah dipenuhi; (2) daerah India yang diduduki Cina menjadi pos depan yang kuat, penuh jaringan komunikasi strategis, landasan meriam dan jalur tinggal landas serta gudang perbekalan dan bahan bakar; (3) jalan raya dataran tinggi Karakorum yang terbentang melintasi sebagian besar daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan telah dibangun dan diperluas sepanjang bagian timur laut yang berbatasan dengan India; dan (4) Cina masih terus mendukung dan mensuplai gerakan separatis di bagian timur laut India dengan uang dan senjata; secara umum dilihat bahwa beralihnya pimpinan Cina dari Mao Zedong ke Hua Guofeng tidak membawa perubahan yang nyata di gelanggang internasional, terutama terhadap India dan ini berarti bahwa asas-asas persamaan derajat, saling menghormati dan bertetangga baik kurang bisa diterapkan karena ada jurang yang tajam antara ucapan dan tindakan pimpinan Cina; dan (5) dialog Beijing dengan New Delhi hanya dilakukan berdasarkan posisi kekuatan dan klaim wilayah.¹

Kunjungan Menlu Huang Hua ke kawasan Asia Selatan merupakan suatu usaha untuk menunjukkan kemauan baik Cina untuk memperbaiki hubungan bertetangga baik. Pertemuan Menlu Huang Hua dengan PM Indira Gandhi mengungkapkan bahwa sengketa perbatasan India-Cina masih bisa terjadi di masa mendatang. Keinginan kedua belah pihak untuk berbicara lebih lanjut merupakan suatu tanda bahwa Cina tidak semata-mata ingin memperbaiki hubungan tetapi juga mempengaruhi sikap India terhadap Uni Soviet dan Pemerintah Heng Samrin di Phnom Penh.² Sejauh ini sikap PM Indira Gandhi maupun Rajiv Gandhi, yang diharapkan menjadi penggantinya setelah kematian Sanjay Gandhi, berdasarkan orientasi undang-undang dan ideologi yang tegas. Diplomasi India dilakukan berdasarkan pertimbangan yang praktis dan pragmatis sehingga terbuka kesempatan untuk suatu pilihan sejauh kepentingan nasional dapat dipertahankan.

ALIANSI GLOBAL

Poros segitiga Cina-Amerika Serikat-Jepang adalah impian Beijing yang berusaha memadukan unsur-unsur front persatuan anti-hegemoni dan menya-

¹*Berita Buana*, 14 Juli 1980.

²*Far Eastern Economic Review*, 3 Juli 1981.

tukan kegiatan politik, ekonomi dan militer mereka guna mengawasi perkembangan di Asia Pasifik dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini.¹ Persekutuan serupa itu akan dapat meningkatkan kepentingan negara-negara yang bersangkutan. Setelah dijalin hubungan diplomatis antara Amerika Serikat dan Cina pada 1 Januari 1979, hubungan antara kedua negara ini semakin erat.² Dalam pertemuan Cina-Amerika Serikat di Tokyo dicapai sepakat kata bahwa mereka: (1) akan bekerja sama menghadapi kekuatan militer Uni Soviet; dan (2) memikul bersama urusan strategis jangka panjang untuk meminimalkan ancaman pembangunan militer Uni Soviet.³

Invasi militer Uni Soviet ke Afghanistan bulan Desember 1979 ternyata mempercepat proses aliansi Washington-Tokyo-Beijing. Kejadian itu mempunyai arti dan dimensi strategi global karena: (1) kemungkinan kekuatan dan teknologi Uni Soviet telah menyamai kekuatan dan teknologi kelompok Barat, khususnya Amerika Serikat, diuji coba; (2) periode 1983 adalah berbahaya bagi negara-negara Barat karena Uni Soviet diperkirakan telah berani mengambil risiko untuk mengadu kekuatan dengan Amerika Serikat; dan (3) Cina beranggapan bahwa pada tahun 1985 Uni Soviet akan melancarkan suatu operasi militer untuk merebut kawasan Timur Tengah. Itulah strategi Uni Soviet di Timur Tengah sehubungan dengan masalah minoritas Islam di Uni Soviet dan menyusutnya suplai energi.⁴ Sejauh ini Uni Soviet berusaha melebarkan pengaruhnya ke segala penjuru dunia dan untuk sebagian berhasil menanamkan pengaruhnya di banyak kawasan.

Aliansi baru itu dirintis dengan kunjungan Presiden Nixon ke Beijing pada tahun 1972. Aliansi ini didasarkan atas kenyataan bahwa keamanan di masa depan menuntut ikatan-ikatan yang lebih erat dan bahwa sikap bersama terhadap ancaman bersama akan mendorong ketiga kekuatan itu (Amerika Serikat, Jepang dan Cina) untuk menggalang suatu barisan pertahanan bersama. Kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Harold Brown telah mendorong proses lahirnya aliansi anti-Uni Soviet yang baru di Asia Timur antara Amerika Serikat, Jepang dan Cina. Pembicaraan antara PM Cina Hua Guofeng dan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter di Tokyo sewaktu pemakaman PM Jepang Masayoshi Ohira semakin mempercepat proses itu. Amerika Serikat dan Cina berusaha bersama-sama membendung ancaman Uni Soviet terhadap Pakistan dan menawarkan bantuan militer kepada negara ini untuk mempersenjatainya sebagai "zona penyangga" baru.⁵ Perkem-

¹*Berita Buana*, 19 Juni 1980.

²*Sinar Harapan*, 11 Juni 1980.

³*Ibid.*

⁴*Kompas*, 15 Pebruari 1980.

⁵*Kompas*, 15 Pebruari 1980.

bangun ini pun ikut mematangkan aliansi itu menjadi kekuatan baru yang potensial. Pada hakikatnya aliansi Washington-Tokyo-Beijing itu dibentuk untuk menghadapi ancaman hegemonisme Uni Soviet dalam rangka mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kemajuan di kawasan Asia Pasifik.¹

Di lain pihak, aliansi itu menimbulkan persepsi yang berbeda pada Uni Soviet. Poros Washington-Tokyo-Beijing merupakan perpaduan kepentingan strategis yang dimaksud untuk menghadapi dan menjinakkan ancaman hegemonisme Uni Soviet. Untuk mengimbangnya dan membela kepentingannya itu Uni Soviet memperkuat posisinya di Afghanistan maupun Vietnam dan berusaha melumpuhkan poros aliansi baru itu.²

Krisis Kampuchea timbul bulan Desember 1978 ketika tentara Vietnam menyerbu Kampuchea dan dalam waktu singkat berhasil mengusir rezim Pol Pot yang didukung Cina serta menunjuk suatu pemerintah boneka di bawah pimpinan Heng Samrin. Sebagai reaksi, pada 17 Pebruari 1979 Cina menyerbu Vietnam dan berkobar perang perbatasan antara kedua negara itu. Pada tahun 1978 Vietnam semakin tenggelam dalam pengaruh Uni Soviet karena menjadi anggota masyarakat ekonomi sosialis Comecon atau Dewan Bantuan Ekonomi Timbal Balik dan menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama dengan Uni Soviet pada 3 Nopember 1978. Vietnam menjadi alat hegemonisme Uni Soviet dan batu loncatan baginya untuk memperluas pengaruhnya ke Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu Cina menyebutnya "Kuba di Asia." Aliansi itu oleh Uni Soviet dimaksud untuk mewujudkan impian hegemoni Uni Soviet di Asia Tenggara. Ambisi Vietnam untuk mendirikan "Federasi Indocina" di bawah pimpinannya oleh Cina dilihat sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan nasionalnya.³

Peranan Uni Soviet sejauh ini juga perlu dilihat secara mendalam. Keterlibatan Uni Soviet dalam konflik Indocina telah menimbulkan jalinan erat dengan Vietnam untuk bersama-sama melawan ekspansi Cina di Asia. Berkait terbentuknya poros aliansi Washington-Tokyo-Beijing tersebut, kedudukan Cina menjadi lebih kuat untuk mengancam Vietnam dan memberikan hukuman kepadanya. Untuk menghadapinya, Vietnam dan Uni Soviet berusaha mempererat hubungan mereka dalam poros Moskwa-Hanoi. Terbuka kemungkinan bahwa aliansi ini akan berkembang menjadi poros Moskwa-Hanoi-New Delhi.⁴

¹Kompas, 12 Juli 1980.

²Ibid.

³Lihat Douglas Pike, "The USSR and Vietnam: Into the Swamp," dalam *Asian Survey*, 12 Desember 1979.

⁴Kompas, 12 Juli 1980.

Di lain pihak terdapat sengketa Uni Soviet-Jepang. Tersedianya fasilitas pangkalan militer di Da Nang dan Teluk Cam Ranh akan meningkatkan kehadiran dan kemampuan operasi Angkatan Laut Uni Soviet di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Dengan meningkatnya kehadiran Angkatan Laut Uni Soviet itu sengketa Uni Soviet-Jepang mengenai Kepulauan Kurille akan meningkat pula.¹ Dengan terbentuknya persekutuan tersebut maka konflik ini akan menjadi semakin tajam.

Sampai batas-batas tertentu terlihat bahwa terbentuknya poros Moskwa-Hanoi-New Delhi akan sangat bergantung pada persepsi India mengenai ancaman langsung Cina terhadap kepentingan dan keamanan nasionalnya. Perkembangan krisis Kampuchea dan masalah Afghanistan sejauh ini membuat ancaman Cina semakin besar, sehingga proses pembentukan aliansi itu akan cenderung untuk berjalan lebih cepat.

Terbentuknya poros Moskwa-Hanoi-New Delhi itu bukan sesuatu yang mustahil dalam politik. Beberapa hal mendukungnya, antara lain: (1) India sangat bergantung pada Uni Soviet untuk persenjataannya; (2) semakin erat-nya hubungan Cina dan Pakistan sebagai musuh tradisional India merupakan ancaman bagi kepentingan nasionalnya; dan (3) pengakuan India terhadap rezim Heng Samrin merenggangkan hubungannya dengan ASEAN, sehingga India akan terdorong untuk menempatkan kepentingan nasionalnya pada kekuatan yang lebih potensial.²

Bahwa Uni Soviet menentang aliansi segitiga Amerika Serikat-Jepang-Cina itu dan berusaha melumpuhkannya adalah suatu reaksi yang semestinya karena sejak lama ia berusaha: (1) melenyapkan pengaruh politik dan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik (penarikan pasukan dari Vietnam dan bagian Asia lain); (2) melancarkan ancaman gerakan militer dan mengobarkan kegiatan politik anti-Amerika Serikat (di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina dan Muangthai); dan (3) sebagai anggota masyarakat Asia Pasifik mengisi lowongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat.

Uni Soviet berusaha menghancurkan atau melumpuhkan aliansi itu dengan segala cara, antara lain dengan: (1) melakukan tekanan politik dan militer untuk memecah aliansi; (2) mengusahakan terbentuknya persekutuan Uni Soviet-Jepang atau menetralisasi Jepang di Asia sebagai mata rantai yang lemah dalam arti militer; dan (3) memanfaatkan kelemahan-kelemahan hubungan Jepang-Amerika Serikat (persaingan ekonomi, tantangan masyarakat Jepang terhadap aliansi militer Jepang-Amerika Serikat).

¹ *Ibid.*

² *Kompas*, 5 April 1980.

Uni Soviet menggunakan "Gunboat Diplomacy" untuk membentuk pengaruh Amerika Serikat dan Cina di satu pihak dan memperluas pengaruhnya sendiri di Asia Tenggara di lain pihak. Untuk itu ia berusaha (1) menggunakan keterlibatan Vietnam di kawasan Indocina; (2) menciptakan jalur kontak langsung dengan ASEAN; (3) memberikan bantuan kepada Vietnam dalam rangka usahanya menguasai Laos dan Kampuchea dengan imbalan fasilitas-fasilitas pangkalan Da Nang dan Teluk Cam Ranh; dan (4) mendapatkan izin singgah di negara-negara ASEAN bagi kapal-kapal armada Pasifiknya.¹

Usaha Uni Soviet untuk menguasai Asia Tenggara dilakukan dengan: (1) mengepung Cina, musuh besarnya di Asia; (2) melenyapkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik dan menghancurkan aliansi Amerika Serikat-Jepang-Cina; dan (3) memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara dengan menggunakan Vietnam sebagai batu loncatan.

PENUTUP

Pengakuan suatu pemerintah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Pengakuan terhadap rezim Heng Samrin yang diangkat oleh Vietnam di Kampuchea setelah tentaranya berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah Pol Pot menjadi persoalan karena rezim Heng Samrin dianggap tidak sesuai dengan kemauan rakyat Kampuchea. Negara-negara sosialis dan beberapa negara lain termasuk India telah mengakuinya, tetapi negara-negara ASEAN, kebanyakan negara Non-Blok dan negara-negara Barat tidak mau melakukannya. Perbedaan itu berakar pada perbedaan kepentingan nasional yang menghasilkan persepsi yang berlainan mengenai masalah Kampuchea dan pengakuan terhadap rezim Heng Samrin.

Sejauh ini pertarungan superpower telah menimbulkan "Perang Dingin" dan "Perang Lokal." Hal ini terjadi karena keterlibatan superpower secara tidak langsung telah memasuki kawasan yang sedang bergolak. Masalah Kampuchea yang merupakan suatu krisis di Asia Tenggara masih jauh dari penyelesaian yang kita harapkan. Selama polarisasi kekuatan berlangsung krisis ini akan berlarut-larut. Sebagai akibatnya Asia Tenggara akan mengalami destabilisasi dan jauh dari keadaan yang diperlukan negara-negara kawasan ini untuk pembangunan nasional mereka masing-masing.

¹*Ibid.*